







DAFTAR SARASEHAN KMAN VI INFORMASI UNTUK PESERTA, NARSUM & UNDANGAN 25-26 Oktober 2022






NO	LOKASI	TANGGAL	
		25 OKTOBER 2022	26 OKTOBER 2022
01	Obhe Kampung Bambar Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kab. Jayapura <div style="text-align: center;">  </div>	<u>Sarasehan 3</u> Judul Topik “RUU Masyarakat Adat dan Masa Depan Masyarakat Adat Nusantara” Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan mendiskusikan terkait dinamika perjalanan pembahasan RUU Masyarakat Adat sejak tahun 2009 hingga saat ini. RUU Masyarakat Adat telah menghadapi berbagai tantangan dan jalan yang berliku dalam proses advokasinya. Tujuan dari terselenggaranya sarasehan ini akan mengidentifikasi secara mendalam terkait hambatan yang melatarbelakangi pengesahan RUU Masyarakat Adat dan membaca peluang politik untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat.	<u>Sarasehan 13</u> Judul Topik “Pemetaan Wilayah Adat Di Seluruh Nusantara Dalam Memperkuat Gerakan Pengakuan dan Perlindungan Ruang Hidup Masyarakat Adat” Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan memaparkan perkembangan pemetaan dan registrasi wilayah adat, status pengakuan wilayah adat serta pembelajaran masyarakat adat dalam mewujudkan kedaulatan wilayah adat melalui adanya kebijakan daerah yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah adat serta pengakuan hutan adat sebagai implementasi dari Putusan MK 35. Sarasehan ini juga akan mendiskusikan strategi dan sinkronisasi percepatan pemetaan partisipatif dan registrasi wilayah adat untuk memperkuat gerakan perlindungan wilayah adat di seluruh nusantara.
02	Obhe Kampung Sereh (Hele Obhe)	<u>Sarasehan 4</u> Judul Topik “Praktek-Praktek Demokrasi Masyarakat Adat: Peluang dan Tantangannya” Deskripsi Singkat	<u>Sarasehan 12</u> Judul Topik “Memperjelas Kedudukan dan Hak Konstitusional Masyarakat Adat dan Kerajaan/Kesultanan di Indonesia”


	<p>Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kab. Jayapura</p> 	<p>Sarasehan ini hendak memotret praktik-praktik demokrasi Masyarakat Adat baik dari aspek kelembagaan adat, partisipasi Masyarakat Adat hingga praktik-praktik pranata adat dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam konteks politik di tingkat lokal, praktik demokrasi Masyarakat Adat turut menentukan dinamika politik di daerah. Selain itu, sarasehan ini akan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan politik elektoral di Indonesia yang lebih berpihak terhadap Masyarakat Adat.</p>	<p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan membicarakan tentang siapa Masyarakat Adat, apa saja karakter pembentuk Masyarakat Adat, bagaimana gelombang dan sejarah penaklukan Masyarakat Adat berhadapan dengan negara dari masa lalu hingga saat ini (kerajaan, kesultanan, bangsa eropa dan Pemerintah Republik Indonesia)</p>
03	<p>Obhe Kampung Dondai</p> <p>Kampung Dondai, Distrik Waibu, Kab. Jayapura</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 8</u></p> <p>Judul Topik “Inisiatif Multi Pihak Dalam Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan mendialogkan situasi terkini yang dihadapi oleh Perempuan Adat di Nusantara dalam beragam bentuk Pengabaian, Pembatasan dan Pengucilan yang berujung pada lapisan kekerasan baik individu maupun secara kolektif. Sejalan dengan rekomendasi Komite CEDAW Periodic 80 kepada Pemerintah Indonesia yang secara tegas dan jelas menyatakan percepatan upaya perlindungan hak perempuan adat untuk menggunakan sumberdaya alam dan tanah; memastikan keadilan gender terlaksana dengan memastikan perempuan pedesaan dan masyarakat adat dapat berkontribusi penuh untuk pembangunan negara; dan menghilangkan praktik adat yang mendiskriminasi perempuan adat kaitannya dengan kepemilikan tanah dan akses perempuan adat terhadap layanan dasar air bersih dan sanitasi yang memadai.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 9</u></p> <p>Judul Topik “Perempuan Adat Adalah Pejuang Perubahan Sosial, Kami Ada Disini!”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan melakukan pemutaran film dokumenter yang meng <i>capture</i> permasalahan-permasalahan eksklusi yang dialami oleh berbagai perjuangan Perempuan Adat dan pengetahuan Perempuan Adat di beberapa Wilayah Pengorganisasian PEREMPUAN AMAN. Melalui Sarasehan ini diharapkan bisa memperluas inisiatif dan dukungan berbagai elemen dalam mendorong hak-hak Perempuan Adat.</p>

<p>04</p>	<p>Obhe Kampung Yakonde</p> <p>Kampung Yakonde, Distrik Sentani Barat, Kab. Jayapura</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 5</u></p> <p>Judul Topik “Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis Wilayah Adat sebagai Wujud dari Penerapan Kewenangan Asal-Usul Desa”</p> <p>Deskripsi Singkat Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dimana desa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Sarasehan ini akan mendiskusikan situasi pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di tingkat Desa. Bagaimana Desa sebagai institusi negara sekaligus institusi sosial yang langsung berhadapan dengan Masyarakat Adat dapat berkontribusi terhadap pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat. Sarasehan ini akan memberikan rekomendasi terkait penguatan kewenangan asal-usul Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 16</u></p> <p>Judul Topik “Resiliensi Masyarakat Adat, Tangguh Menghadapi Krisis”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan mendiskusikan resiliensi masyarakat adat, baik dari pengalaman dalam menghadapi krisis sebelumnya maupun krisis yang akan datang. Pembelajaran dari Pandemi COVID 19 serta krisis lainnya dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa masyarakat adat telah mampu bertahan dari krisis. Sarasehan ini bertujuan untuk menemukan strategi memperkuat resiliensi masyarakat adat.</p>
<p>05</p>	<p>Obhe Kampung Hobong</p> <p>Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kab. Jayapura</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 17</u></p> <p>Judul Topik “Gerakan Pulang Kampung: Pemuda Adat dan Aksi Kolektif Penyelamatan Bumi. Melawan Kepunahan dan Krisis Iklim dengan Teknologi yang Diprakarsai Pemuda Adat”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan membahas tentang berbagai inisiatif pemuda adat untuk terlibat aktif dalam melindungi dan mengelola wilayah adatnya secara lestari. Dimulai dengan Gerakan Pulang Kampung yang memanggil para pemuda adat yang berada di perkotaan, untuk kembali ke kampung/komunitasnya, berbekal pengetahuan dari</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 19</u></p> <p>Judul Topik “Pendidikan Adat: Menemukan Akar, Menata Jalan Menuju Kedaulatan Kemandirian dan Martabat Masyarakat Adat Untuk Memastikan Masa Depan Masyarakat Adat & Wilayah Adat”</p> <p>Deskripsi Singkat Sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia mengarungi zaman memberikan banyak pelajaran bahwa pendidikan dapat menjadi alat penindasan maupun pembebasan. Sebagai alat penindasan, ia langsung menyerang jantung pertahanan suatu bangsa: mengaburkan sejarah, memusnahkan jatidiri, dan mengubah cara pikir dan cara pandangnya atas</p>

		para tetua, membangun kampung untuk memastikan masa depan Masyarakat Adat. Sarasehan ini juga akan mendiskusikan isu krisis iklim yang berpotensi mengancam masa depan kaum muda.	dunia. Sebagai pembebas, ia membangun kembali kesadaran kritis suatu bangsa untuk berdialog dengan kenyataan dan ruang hidupnya sehingga mampu hidup sebagai bangsa seutuhnya. Sarasehan ini akan menjadi ruang bersama Masyarakat Adat Nusantara untuk bercermin dan bergotong-royong memikirkan pendidikan seperti apa yang bisa membuat Masyarakat Adat Nusantara mampu bertahan dan hidup sebagai masyarakat adat.
06	Obhe Kampung Netar/Nendali (Ruku Nei Wally Nei) Kampung Netar/Nendali, Distrik Sentani Timur, Kab. Jayapura 	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 14</u></p> <p>Judul Topik “Membangun Sistem Ekonomi yang Kuat dan Efektif Berbasis Nilai, Praktek dan Inovasi Masyarakat Adat”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan membahas tentang membangun sistem ekonomi yang kuat dan efektif berbasis nilai, praktek dan inovasi masyarakat adat. Selain itu pentingnya kajian valuasi ekonomi di wilayah adat yang membantu advokasi model ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat adat. Berbagai pembelajaran dan pengembangan usaha ekonomi melalui kelompok usaha dan Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) sebagai bentuk upaya pengembangan ekonomi di tingkat komunitas. Sarasehan ini bertujuan untuk merumuskan strategi ekonomi masyarakat adat serta memperkuat gerakan ekonomi masyarakat adat.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 22</u></p> <p>Judul Topik “Peran Media Massa dan Media Sosial dalam Mendukung Perjuangan Hak Masyarakat Adat dan Sebagai Ruang Kebebasan Berpendapat.”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan mendiskusikan tentang bagaimana kondisi masyarakat adat diantara pusaran arus informasi, wacana dan kebebasan berpendapat saat ini. Media arus utama banyak dipengaruhi oleh penguasa, sedangkan dalam konteks media massa dan media sosial, pemberitaan yang berpihak pada Masyarakat Adat biasanya bisa ditemui pada media-media independen yang jumlahnya tak besar dan jangkauannya juga tak semasih media-media arus utama. Sarasehan ini juga akan mendiskusikan peluang-peluang dalam upaya memperkuat pengaruh masyarakat adat di ruang-ruang publik.</p>
07	Obhe Kampung Ayapo Kampung Ayapo, Distrik Sentani	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 1</u></p> <p>Judul Topik: Tema Khusus Papua “Implikasi Otonomi Khusus, DOB terhadap Masyarakat Adat, Wilayah Adat, dan Lingkungan Hidup Papua”</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 2</u></p> <p>Judul Topik: Tema Khusus Papua “Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua”</p>

	<p>Timur, Kab. Jayapura</p> 	<p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini bertujuan untuk membahas implikasi dan penanganan dampak dari kebijakan UU Otsus Papua dan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) terhadap perubahan tata kelola kebijakan pembangunan dan pemerintahan yang otonom, bersih dan bertanggung jawab, yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup di Tanah Papua.</p>	<p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini bertujuan untuk menyediakan ruang dialog antara masyarakat adat Papua dan pemerintah serta organisasi masyarakat sipil untuk membahas tentang situasi terkait manusia, tanah, dan SDA di Papua. Termasuk pembahasan tentang kebangkitan dan ketahanan Masyarakat Adat dalam mengamankan, mengelola dan memanfaatkan tanah dan hutan, livelihood, berbasis pada inovasi pengetahuan dan hak Masyarakat Adat secara adil dan berkelanjutan.</p>
08	<p>Obhe Kampung Yokiwa</p> <p>Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur, Kab. Jayapura</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 6</u></p> <p>Judul Topik “Memperkuat Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Mandat Konstitusi untuk Menghormati dan Melindungi Masyarakat Adat”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan membicarakan berbagai instrumen hukum nasional terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat serta peran pemerintah dan pemerintah daerah khususnya di Tanah Papua dalam menjalankan kebijakan tersebut. Sarasehan ini juga akan mendiskusikan berbagai hambatan operasionalisasi proses kebijakan terkait pengakuan wilayah adat, hutan adat serta tanah/hak ulayat.</p>	<p style="text-align: center;">Sarasehan 21</p> <p>Judul Topik “Membangun Sistem Pendukung Pendanaan Untuk Penguatan Organisasi Rakyat dan Masyarakat Adat”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan membahas tentang mekanisme pendanaan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) dalam mendukung upaya dan inisiatif MAKL sehingga dapat terus berkontribusi langsung dalam mengembangkan berbagai inisiatif untuk menjaga dan mengelola tanah dan wilayah. Mekanisme pendanaan berkelanjutan bagi MAKL merupakan respon dari berkembangnya kesadaran di tingkat global tentang peran penting Masyarakat Adat dalam menjaga bumi yang direfleksikan dengan adanya komitmen untuk meningkatkan dukungan pendanaan bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari berbagai donor internasional.</p>
09	<p>Obhe Kampung Homfolo</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 11</u></p> <p>Judul Topik</p>	<p style="text-align: center;">Sarasehan 20</p> <p>Judul Topik</p>

	<p>(Enakhow Obhe)</p> <p>Kampung Simforo, Distrik Ebungfau, Kab. Jayapura</p> 	<p>“Masyarakat Adat dan Transisi Energi Berkeadilan”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan "Masyarakat Adat dan Transisi Energi Berkeadilan" berupaya untuk mengupas evolusi konsep transisi energi di ranah global dalam kerangka keadilan iklim dan upaya untuk menahan kenaikan rata-rata suhu dunia di bawah 1,5 derajat, serta-prinsip kesetaraan dan keadilan yang sudah mulai didorong oleh komunitas masyarakat adat global untuk memastikan terwujudnya "Just Energy Transition" atau Transisi Energi Berkeadilan. Selain itu, sarasehan ini juga bertujuan untuk mengupas kerangka kebijakan transisi energi nasional serta menganalisis potensi friksi dan gesekan dengan hak masyarakat adat atas lahan dan penghidupan. Harapannya, informasi dan analisis yang disampaikan dapat menjadi landasan advokasi masyarakat adat dalam konteks mendorong transisi energi berkeadilan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat tapak.</p>	<p>“Membangun Pendanaan Mandiri Dan Berkelanjutan Bagi Organisasi Masyarakat Adat”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan mendiskusikan model-model penggalangan dana organisasi yang mengarah pada kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pendanaan dari lembaga donor. Dalam sarasehan ini juga akan didiskusikan rencana strategi dan kerja bersama pengurus organisasi, kader dan komunitas adat dalam melakukan upaya penggalangan dana organisasi secara mandiri dan berkelanjutan.</p>
10	<p>Obhe Kampung Putali</p> <p>Kampung Putali, Distrik Ebungfau, Kab. Jayapura</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 10</u></p> <p>Judul Topik “Advokasi Perlindungan Masyarakat Adat”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini membahas tentang berbagai bentuk pembelaan dan pendampingan terhadap kasus konflik yang dihadapi oleh Masyarakat Adat di nusantara, umumnya konflik yang berkaitan dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam, yang banyak berakhir pada persoalan hukum. Dalam Sarasehan ini juga akan dibahas bagaimana strategi pendampingan untuk pengakuan, perlindungan dan pemulihan</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 7</u></p> <p>Judul Topik “Menyoal Pengakuan Negara Terhadap Penyelenggaran Peradilan Adat di Indonesia”</p> <p>Deskripsi Singkat Penerapan penyelesaian sengketa atau pelanggaran aturan adat melalui peradilan adat masih banyak digunakan oleh komunitas-komunitas adat di Nusantara. Akan tetapi penerapan sanksi adat acap kali bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sarasehan ini akan membahas peluang dan tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam</p>

		<p>secara hukum bagi Masyarakat Adat termasuk aspek emergency respon dalam adokasi perlindungan masyarakat adat.</p>	<p>menerapkan peradilan adat. Sarasehan ini juga diharapkan bisa mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan pengakuan terhadap peradilan adat sebagai mekanisme penyelesaian masalah di komuintas adat.</p>
11	<p>Para-para Ondoafi Kayu Pulo</p> <p>Kampung Tahima Soroma, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura</p> 	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 15</u></p> <p>Judul Topik “Karbon di Wilayah Adat, Berkat atau Kutukan?”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan membahas secara kritis tentang karbon di wilayah adat. Apa yang menjadi latar belakang dari bisnis ini, apa hubungannya dengan issue-issue global tentang perubahan iklim dsb. Tujuan utama dari sarasehan ini adalah untuk memahami dan mengkritisi kebijakan dan implementasi perdagangan karbon di wilayah adat dan bagaimana Masyarakat Adat menyikapinya, serta apa rekomendasi penting untuk memastikan hak Masyarakat Adat dalam putaran bisnis yang akan mempengaruhi masa depan wilayah adat ini.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 18</u></p> <p>Judul Topik “Situasi dan Tantangan Ruang Hidup Masyarakat Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan membahas tentang situasi ruang hidup dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas-komunitas Masyarakat Adat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Bagaimana sistem-sistem pengelolaan berbasis pengetahuan lokal/tradisional atas pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjamin kesejahteraan Masyarakat Adat dan keberlanjutan ekologis menjadi model-model yang dapat diidentifikasi, dipromosikan dan diadopsi oleh negara.</p>
12	<p>Pulau Metu Debi</p> <p>Kampung Injros/Enggros, Distrik Abepura, Kota Jayapura</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 23</u></p> <p>Judul Topik “Depopulasi dan Marjinalisasi Masyarakat Adat”</p> <p>Deskripsi Singkat Sarasehan ini akan mendiskusikan tentang marjinalisasi dan depopulasi masyarakat adat akibat dari kebijakan dan pola pembangunan yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat. sarasehan ini juga akan mendiskusikan masyarakat adat yang selama ini secara terus-menerus mengalami diskriminasi sehingga</p>	<p style="text-align: center;"><u>Sarasehan 24</u></p> <p>Judul Topik “Pengakuan dan Pelindungan Warisan Budaya Masyarakat Adat Sebagai Kekuatan dan Identitas Bangsa”</p> <p>Deskripsi Singkat Topik ini akan membahas : bagaimana situasi identitas dan warisan budaya Masyarakat Adat dalam arus globalisasi saat ini. Perlindungan secara hukum dan kebijakan terhadap pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual Masyarakat Adat di</p>



SCAN ME

menyebabkan pengurangan populasi, hilangnya wilayah adat, dan kehancuran identitas budaya. Harapannya sarasehan ini dapat menyusun strategi penyelamatan dan perlindungan masyarakat adat yang mengalami marginalisasi dan mengarah ke depopulasi.

Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup berat, karena rejim HAKI bicara tentang kekayaan intelektual sebagai hak individu, serta folklore, tari-tarian dan sebagainya sebagai hak negara. Oleh sebab itu, Masyarakat Adat perlu merancang strategi untuk memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual kolektif yang dimiliki oleh komunitas-komunitas Masyarakat Adat.